



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SUB UNIT KERJA : BIDANG BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARMANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**
3. NHK : **274043**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.358.000.000**

1. Tanah Seluas 1900 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
2. Tanah Seluas 294 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 882.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 778 m2/300 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.556.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/36 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 204.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMHA SCORPIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, MINIBUS KIJANG INOVA G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	69.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	56.668.068
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.688.168.068
III. HUTANG	Rp.	65.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.623.168.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.